

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI WEBSITE PPID PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA
TANJUNGPINANG**

Oleh:

Diko Ardiansyah

NIM. 2205010013

ABSTRAK

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara digital melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kejelasan informasi hingga kesiapan sumber daya pengelola. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan informasi publik melalui website PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Informan terdiri atas PPID Utama, Admin PPID Pelaksana, serta pengguna layanan dari kalangan mahasiswa dan non-mahasiswa (Pegawai Negeri Sipil dan swasta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berlangsung, tetapi memperlihatkan ketimpangan antardimensi. Pada indikator komunikasi, penyaluran informasi melalui beragam kanal telah berjalan, namun kejelasan dan konsistensi informasi masih lemah karena sebagian persyaratan tidak terdokumentasi pada website. Pada indikator sumber daya, jumlah petugas dan anggaran masih terbatas, serta kewenangan atas platform berada pada pemerintah pusat. Indikator disposisi menjadi faktor penopang utama melalui komitmen dan sikap petugas yang responsif. Pada indikator struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur telah tertib, sedangkan koordinasi antarperangkat daerah (fragmentasi) masih menjadi hambatan. Dengan demikian, keberlangsungan layanan lebih banyak ditopang oleh disposisi pelaksana dan ketertiban prosedur, sementara komunikasi dan sumber daya masih membatasi konsistensi pelayanan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Informasi Publik, PPID, Website, Edward III

**IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION SERVICE POLICY
THROUGH THE PPID WEBSITE AT THE DEPARTMENT
OF COMMUNICATION AND INFORMATICS
OF TANJUNGPINANG CITY**

By:
Diko Ardiansyah
NIM. 2205010013

ABSTRACT

The implementation of public information disclosure through the PPID website at the regional level still faces various obstacles, from information clarity to resource readiness. This study therefore aims to examine the implementation of public information service policy through the PPID website at the Department of Communication and Informatics of Tanjungpinang City. The study applied George C. Edward III's policy implementation theory across four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, using a descriptive qualitative approach with purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman interactive model, and validated through source and technique triangulation. Informants comprised the Main PPID, the Executing PPID Admin, and service users from student and non-student backgrounds (civil servants and the private sector). Results show that implementation has been carried out but reveals an imbalance across dimensions. Communication channels function well, yet information clarity and consistency remain weak due to undocumented requirements on the website. Resources are constrained by limited staff, insufficient budget, and central government control over the platform. Disposition serves as the primary supporting factor through officers' commitment and responsiveness. Bureaucratic structure shows a split: the Standard Operating Procedure is well ordered, while inter-agency coordination (fragmentation) remains an obstacle. Overall, service continuity relies more on implementers' disposition and procedural order, while communication and resources continue to limit service consistency.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Service, PPID, Website, Edward III